

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

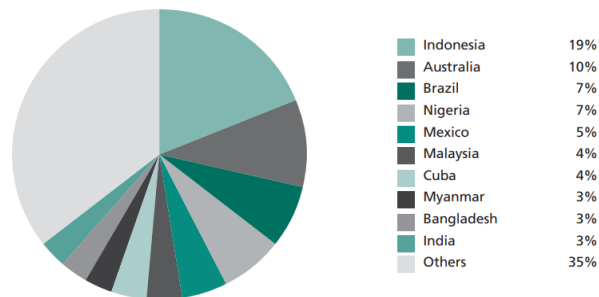
Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama, tanpa mengesampingkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Konsep ini secara global ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diimplementasikan melalui agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri atas 17 tujuan dan 241 target. SDGs tidak hanya berfungsi sebagai komitmen normatif, akan tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dalam menilai keberhasilan kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional maupun lokal. Setiap sektor pembangunan dituntut untuk dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs, termasuk sektor pariwisata yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Ekowisata merupakan salah satu bentuk dari *Sustainable Tourism*, yaitu sektor ekonomi yang meliputi berbagai bentuk wisata berwawasan lingkungan. Prinsip berkelanjutan dalam ekowisata lebih dari sekedar kegiatan rekreasi, ekowisata berperan sebagai solusi penyelamatan ekosistem melalui restorasi alam, pengelolaan lingkungan, serta penciptaan ekosistem baru yang mampu mendukung keseimbangan ekologis. Pengembangan ekowisata memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SDGs dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ekowisata (Khaeriah et al., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata yang dikelola secara baik mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pencapaian SDGs. Menurut Forje et al. (2021), dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konversi, yaitu Taman Nasional Campo Ma'an (CMNP) di Kamerun, tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menggunakan skema SDGs sebagai indikator keberhasilan. Penelitian menurut Tamrin et al. (2022), juga menjelaskan bahwa pemulihan ekosistem hutan mangrove mendukung SDGs 1, yaitu pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui kegiatan perikanan, pariwisata, dan jasa lingkungan lainnya. Sedangkan, penelitian menurut Nurhati & Murdiyarso (2022), menyoroti bahwa pengelolaan mangrove mendukung pencapaian SDGs 13 dan 14 yaitu terkait perubahan iklim dan ekosistem lautan, yang menekankan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi. Sehingga dapat diartikan bahwa ekowisata menjadi instrumen penting dalam menentukan sejauh mana pencapaian tujuan SDGs.

Indonesia memiliki modal ekologis yang potensial untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 1.892.410 km² dan terdiri dari 17,001 pulau, serta memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, yaitu sekitar 99.000 km (BPS, 2025), Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir. Indonesia juga memiliki kawasan hutan mangrove terluas di dunia, yaitu seluas 3,44 juta hektare atau sekitar 23% dari total

14,7 juta ha mangrove yang ada di dunia (Peta Mangrove Nasional Tahun, 2025). Kondisi iklim tropis memungkinkan ekosistem mangrove berkembang secara optimal pada wilayah pesisir. Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem penting yang berada pada zona transisi antara darat dan laut.



Gambar 1.1 Persentase Sebaran Hutan Mangrove di Dunia tahun 2005

Sumber: (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2007)

Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati posisi pertama dalam persebaran hutan mangrove terluas di dunia. Keberadaan ekosistem mangrove berperan penting secara ekologis yaitu sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati, penyangga pesisir dari abrasi, sedimentasi, dan intrusi air laut. Secara ekonomi, keberadaan ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan melalui sektor pariwisata berbasis alam dengan menawarkan keindahan panorama mangrove yang ada, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, populasi penduduk Indonesia yang meningkat pesat menimbulkan tekanan signifikan terhadap ekosistem mangrove (Martuti et al., 2019).

Menurut laman World Population Review (2025), Indonesia menempati posisi keempat penduduk terbanyak di dunia yaitu mencapai 285.721 juta jiwa. Sekitar 16,42 juta jiwa penduduk Indonesia tercatat sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir (Pangemanan, 2023). Kepadatan penduduk dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap sumber daya alam di wilayah pesisir,

khususnya ekosistem mangrove. Pemanfaatan sumber daya pesisir secara intensif berpotensi menyebabkan degradasi dan deforestasi hutan mangrove. Selain itu, pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa turut memicu arus urbanisasi, terutama di kota-kota metropolitan, sehingga kondisi ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan infrastruktur (Patil & Pattanshetti, 2024).

Pemanfaatan ekosistem mangrove yang seringkali bersifat destruktif semakin memperburuk kondisi ekologis, menjadikannya sulit dikendalikan dan berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan. Hal tersebut diperkuat oleh (Hidayat & Dessy, 2021), yang menjelaskan bahwa ekosistem mangrove kini dikategorikan sebagai salah satu ekosistem paling terancam di dunia, dengan laju kerusakan tercepat dan terbesar di dunia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2007), bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 40 persen dari hutan mangrove dalam tiga tahun terakhir. Hal ini selaras dengan kutipan pada laman [antaranews.com](https://www.antaraneews.com), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa:

”Kita setiap tahun kehilangan mangrove kurang lebih 19.501 ha. Jadi, kita membutuhkan upaya serius untuk bisa mengatasi kehilangan mangrove,”
Sumber: (<https://www.antaraneews.com/berita/4871965/klh-ingatkan-urgensi-rehabilitasi-ekosistem-mangrove-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa KLHK menyoroti pentingnya upaya mengatasi potensi kehilangan luasan mangrove yang terjadi setiap tahunnya. Upaya pelestarian ekosistem mangrove selama ini sering kali hanya berfokus pada rehabilitasi kawasan rusak. Sedangkan, upaya konservasi

terhadap ekosistem mangrove yang masih baik justru krusial untuk menjaga ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Akibatnya, kondisi hutan mangrove menjadi sangat bervariasi, dari kondisi yang masih baik hingga yang rusak dan tidak terpelihara. Menurut Nurhati & Murdiyarso (2022), mangrove seluas 2.673.583 ha atau 81 persen dari total luas mangrove dinyatakan dalam kondisi baik sedangkan mangrove dengan luas 637.624 ha dinyatakan kritis dan memerlukan rehabilitasi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan kerusakan mangrove, namun justru masih banyak program restorasi sebelumnya yang gagal. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan terkait ekologis dan kesalahan dalam menginterpretasikan tata kelola kawasan pesisir (Sasmito et al., 2023).

Kondisi tersebut diperkuat oleh Martuti et al. (2019), meskipun nilai ekonomi total ekosistem mangrove di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp 820 triliun. Akan tetapi, pengelolaan hutan mangrove di Indonesia belum dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini diperkuat oleh Indahyati et al. (2024), bahwa pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat lokal, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan antar program, serta ketidakefektifan pelaksanaan rehabilitasi di lapangan. Sehingga diperlukan penguatan kerangka regulasi, kebijakan, dan kelembagaan yang terintegrasi secara jelas di semua tingkat karena menjadi aspek penting dalam pengelolaan mangrove.

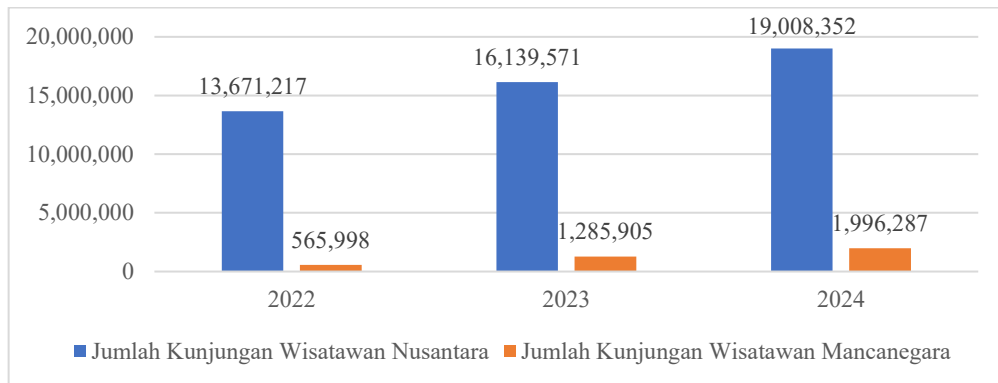
Pemerintah Indonesia telah menanggapi kompleksitas tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya.

Pada bagian menimbang dijelaskan *“bahwa kebun raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ berperan untuk mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan sehingga perlu ditingkatkan pembangunan dan pengelolaannya.”* Hal tersebut dapat dipahami bahwa meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kebun raya menjadi penting karena kawasan ini berfungsi sebagai ruang konversi tumbuhan yang berperan meminimalisir laju degradasi keanekaragaman tumbuhan, termasuk mangrove. Pada Pasal 3 Ayat (1) juga menyatakan bahwa *“fungsi kebun raya terdiri atas, konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.”* Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi kebun raya yaitu sebagai destinasi wisata. Oleh karena itu, kebun raya dapat dipahami sebagai bentuk wisata berbasis lingkungan yang memiliki urgensi untuk terus ditingkatkan pembangunan dan pengelolaannya (Martuti et al., 2019).

Komitmen pemerintah tersebut semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang menjelaskan *“bahwa Ekosistem Mangrove rentan mengalami kerusakan jika tidak dilindungi dan dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove secara berkelanjutan dan terintegrasi.”* Sehingga dapat diartikan bahwa pentingnya pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan yang artinya tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, akan tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dengan menekankan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Selanjutnya pada Pasal 76 Huruf a terkait ketentuan umum zonasi Kawasan

Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d bahwa *“ketentuan pemanfaatan ruang meliputi: 1) kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove, pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata; 2) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan bangunan pelindung pantai, pembangunan dermaga/tambatan perahu yang memperhatikan aspek ekologis, dan wisata, instalasi utilitas dan jaringan prasarana; dan 3) kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan jasa komersial selain yang diperbolehkan dengan syarat.”* Hal tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan mangrove dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan tiga kategori pemanfaatan zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove, yaitu kegiatan yang diperbolehkan sepenuhnya, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara dengan luas wilayah 335,93 km² dan penduduk paling banyak di Jawa Timur yaitu 2.931.611 juta jiwa. Kota Surabaya juga merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan garis pantai yang panjang meliputi wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Letak geografis Surabaya memiliki potensi kawasan pesisir timur yang strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Hal tersebut selaras dengan pencapaian Kota Surabaya sebagai destinasi utama di Jawa Timur yaitu mencapai sebanyak 27.206.567 perjalanan pada tahun 2024. Berikut merupakan data jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya mulai tahun 2022 - 2024:



Gambar 1.2 Grafik Kunjungan Wisatawan ke Kota Surabaya
 Sumber: (Pemerintah Kota Surabaya, 2025)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara di Kota Surabaya selama tahun 2022 – 2024. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan daya tarik wisata dan pengembangan berbagai destinasi baru yang mampu menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal ini selaras dengan penyampaian hidayat pada laman surabaya.go.id, sebagai berikut:

“Adapun destinasi wisata yang paling favorit atau punya nilai jual kepada wisatawan adalah Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, Balai Pemuda atau Alun-alun Surabaya, Wisata Perahu Kalimas, THP Kenjeran, Kebun Raya Mangrove, dan juga Romokalisari *Adventure Land*,”

Sumber: (<https://www.surabaya.go.id/id/berita/78329/sepanjang-tahun-2023-wisatawan-yang-berkunjung-ke-surabaya-tembus-174-juta>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025)

Melalui penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Kebun Raya Mangrove menjadi salah satu destinasi wisata yang paling digemari oleh wisatawan di Surabaya. Kota Surabaya memiliki Wilayah Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) yang mampu menunjang pertumbuhan mangrove dan memberikan peluang untuk pengembangan ekowisata mangrove. Wilayah Pamurbaya telah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang mencakup Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Mulyorejo (Hidayati et al., 2024).

Hutan Mangrove Surabaya telah ditetapkan sebagai Kebun Raya Mangrove oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 188.45/145/436.1.2/2018 tentang Penetapan Lokasi Kebun Raya Mangrove Surabaya. Lokasi Kebun Raya Mangrove memiliki total luas 34 ha yang mencakup tiga wilayah yaitu Mangrove Gunung Anyar seluas 11 ha, Mangrove Medokan Sawah seluas 16 ha, dan *Mangrove Information Center/Wonorejo* seluas 7 ha dengan total sejumlah 74 spesies mangrove (Bappedalitbang Kota Surabaya, 2025). Kebun Raya Mangrove memiliki fokus pengembangan utama di Gunung Anyar. Hal tersebut juga didukung oleh penjelasan Ibu Dian selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove Kota Surabaya pada saat pra - penelitian, yang menyampaikan sebagai berikut:

“Munculah ide untuk bikin Kebun Raya Mangrove. Awalnya di Wonorejo karena disana juga lebih dulu, tapi setelah dibuat *masterplan* sama Kementerian PUPR, ternyata jika kita mau kembangkan itu tidak cukup dan tidak mengatasi secara anggaran dan wilayah. Akhirnya di Gunung Anyar ini, di Wonorejo juga jalan tapi fokus pengembangan Kebun Raya Mangrove di Gunung Anyar,” (Hasil pra-wawancara pada tanggal 15 November 2025)

Kebun Raya Mangrove diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN yang didampingi oleh Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya dan Bapak Laksana Tri Handoko selaku Ketua Badan Riset dan Inovasi (BRIN) pada tanggal 26 Juli 2023 yang bersamaan dengan Hari Raya Mangrove Internasional. Dalam agenda peresmian tersebut Ibu Mega juga menyampaikan, sebagai berikut:

“Di antara 45 kebun raya di Indonesia, ini salah satu yang dikelola dengan baik serta konsisten,” ujarnya.

Sumber: (<https://www.antaraneews.com/berita/3653226/brin-bantu-pencatatan-jenis-mangrove-di-kebun-raya-surabaya>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025)

Perkembangan Kebun Raya Mangrove yang signifikan tersebut, tentu tidak luput dari keterlibatan berbagai *stakeholder*. Menurut Hidayati et al. (2024), *stakeholder* yang terlibat yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) dan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Adapun pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), salah satunya PT *United Tractors* yang mendukung penyediaan bibit mangrove langka dan pengembangan kawasan Kebun Raya Mangrove. Selain itu, juga melibatkan masyarakat yaitu pelaku UMKM, nelayan, dan kelompok tani dalam mendukung fasilitas dan wahana wisata di Kebun Raya Mangrove Surabaya.

Keberadaan UPT Kebun Raya Mangrove Kota Surabaya juga didukung oleh peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2023 tentang pembentukan UPT Kebun Raya Mangrove Kota Surabaya di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Namun, peraturan tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2025, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya. Meskipun peraturan tersebut telah diresmikan tahun 2025, namun transformasi perangkat daerah yang menaungi UPT Kebun Raya Mangrove Kota Surabaya baru berlaku per tahun 2026.

Adapun berbagai prestasi yang diraih yaitu, menjadi satu-satunya kebun raya tematik mangrove di Indonesia, yang mengusung tema khusus yaitu mangrove. Selain itu, berhasil meraih nominasi Daya Tarik Wisata Alam dalam kompetisi *East Java Tourism Award* pada tahun 2023 dan Rekor MURI untuk kategori Penanaman Pohon secara Serentak di Kebun Raya Terbanyak oleh BRIN pada tahun 2024. Kebun Raya Mangrove Surabaya juga berhasil meraih Juara ke-3 kategori *Nature Based Tourism* dalam ajang *Surabaya Tourism Awards (STA)* pada tahun 2024 dan 2025. Melalui penghargaan tersebut memperkuat peran Kebun Raya Mangrove Surabaya dalam mempromosikan pariwisata berbasis alam di tengah kota. Selain itu, Kebun Raya Mangrove Surabaya berhasil meraih prestasi di tingkat internasional yang secara resmi menjadi bagian dua organisasi dunia, yaitu *World Mangrove Center (WMC)* dan *Botanic Gardens Conservation International (BGCI)* (Bening & Nugraha, 2025; Pemkot Surabaya, 2025).

Sejak diresmikan hingga akhir tahun 2023, pengunjung Kebun Raya Mangrove Surabaya dapat menikmati seluruh fasilitas secara gratis dengan hanya menuliskan kesan di buku pengunjung. Namun, mulai 1 Januari 2024, diberlakukan tarif masuk sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023, yang mewajibkan pengunjung untuk membayar tarif masuk. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan Kebun Raya Mangrove Surabaya secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas layanan bagi pengunjung. Berikut terdapat data jumlah pengunjung pada tahun 2023 sampai 2025.

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Tahun 2023 sampai 2025

No.	Bulan	2023	2024	2025
1	Januari	2.837	8.885	7402
2	Februari	2.156	6.232	7163
3	Maret	1.717	1.990	3081
4	April	932	3.964	8979
5	Mei	2.812	5.447	8478
6	Juni	3.535	5.693	8160
7	Juli	4.458	6.750	6934
8	Agustus	11.153	4.090	6593
9	September	13.046	3.169	3825
10	Oktober	13.219	3.998	5051
11	November	12.145	4.605	3962
12	Desember	12.731	5.924	4780
Total		80.741	60.747	74.408

Sumber: Dokumen UPT KRM Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung Kebun Raya Mangrove Surabaya bersifat fluktuatif. Menurut Bappedalitbang Kota Surabaya (2025), adanya penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2024 disebabkan karena adanya perubahan pemberlakuan kebijakan retribusi menjadi sebesar Rp. 15.000 bagi wisatawan lokal pada hari *weekend*. Kebijakan berbayar ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat, yang berpendapat bahwa Kebun Raya Mangrove Surabaya seharusnya dapat dinikmati publik secara gratis. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberlakukan kebijakan retribusi. Akan tetapi, diturunkan menjadi Rp. 5.000 bagi wisatawan lokal pada hari *weekday*. Namun, tarif masuk tersebut kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2025, sehingga biaya masuk pada hari *weekday* berubah menjadi Rp. 10.000 dan pada hari *weekend* berubah menjadi Rp. 15.000 (Fadhilah, 2025).

UPT Kebun Raya Mangrove Kota Surabaya telah menyediakan kritik dan saran untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung yaitu loket tiket dan

secara tidak langsung melalui fitur ulasan pada Google Maps. Melalui fitur tersebut menjadi cara pihak pengelola wisata dalam menilai kepuasan pengunjung secara singkat. Berikut terdapat beberapa ulasan pengunjung yang diperoleh dari google maps Kebun Raya Mangrove Surabaya pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Ulasan Pengunjung Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar

Nama	Ulasan
Ary Cayri	28 Juni 2025. tempat wisata mudah ditemukan tiket masuk 15k/orang (anak tb>100cm bayar full), parkir 5k. Tempat lumayan luas, tapi sayang banyak wahana yang tidak dioperasikan (<i>aviary</i> dan sepeda air tutup). Termasuk sepi untuk wisata seluas ini, pemkot diharapkan lebih berinovasi lagi untuk menarik pengunjung. Wahana diperbanyak dan dirawat, semoga tidak seperti <i>Surabaya Night Carnival</i> yang hanya bertahan beberapa tahun saja.
Dann Oke	1 bulan lalu. selamat pagi, pendapat saya mengenai tempat ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. parkir 10k mobil, kemahalan karena masih ada tiket masuk 15k, parkirannya terbuka dan panas sekali, jaraknya lumayan jauh, jika musim panas maka panas sekali, jika musim hujan ya bakal keujanan, wong jauh, belum ada pohon yang rindang. menurut saya parkir mobil 5k jika masih ada tiket masuk, atau seperti kenjeran 10k free tiket masuk. 2. HTM, menurut saya kemahalan, jika 15k free parkir, atau mau dipisah: parkir 5k, tiket 10k, bisa dibandingkan dengan misal taman harmoni, kenjeran, atau KBS. 3. kantor dan area baca, tidak ada petugas disana, alangkah baiknya ada petugas yang menjelaskan dan membantu pengunjung. 4. kebersihan bagus, beberapa toilet bersih, sampah juga jarang terlihat, tempat sampah cukup tersedia. 5. fasilitas masih kurang dan perlu ditingkatkan, bisa dilihat lagi tujuan awalnya untuk apa dibangun? edukasi kah atau apa. aviari juga sekedar ada, hanya ada burung merpati saja, tanpa petugas. 6. beberapa tempat duduk di dalam hutan mangrove sudah banyak yang korosi dan rusak. alangkah baiknya kawasan umum, taman dll dilarang merokok, karena banyak anak-anak. fasilitas/wahana kurang sekali, saya kurang dari 1 jam dah selesai dari awal sampai akhir, minimal 3 jam lah. bukanya terlalu siang kalau jam 8, Surabaya itu panas, saran buka jam 6 pagi. 7. jika HTM tetap dipertahankan 15k sebaiknya free perahu, toh tidak semua berani naik perahu, ga bakal rugi, tetapi edukasinya dapat, mau naik perahu masih bayar lagi. terima kasih, semoga semakin baik.

Sumber: Google Maps Kebun Raya Mangrove Surabaya, diakses pada 15 Oktober 2025

Berdasarkan berbagai ulasan pengunjung tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun Kebun Raya Mangrove Surabaya telah mengalami perkembangan

signifikan melalui beberapa penghargaan yang telah diraih. Akan tetapi, masih menghadapi sejumlah permasalahan. Beberapa keluhan yang muncul meliputi pelayanan yang kurang informatif, wisata yang relatif sepi, fasilitas yang tidak berfungsi optimal, tarif masuk yang mahal karena masih dikenakan biaya parkir, dan tidak ada kawasan merokok sehingga mengganggu anak-anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya tindak lanjut pengelolaan Kebun Raya Mangrove Surabaya oleh pihak pengelola sehingga penghargaan yang telah diraih dapat selaras dengan pelayanan dan fasilitas yang ada di lapangan.

Kunjungan wisata yang relatif rendah memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Kebun Raya Mangrove Surabaya. Minimnya pengunjung menyebabkan pendapatan dari tiket, jasa wisata, aktivitas edukasi, maupun UMKM lokal tidak stabil, sehingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor ekowisata mengalami ketidakpastian ekonomi. Permasalahan tersebut juga disoroti oleh Churin'in et al. (2024), yang memberikan saran bahwa pengelola Kebun Raya Mangrove Surabaya perlu memperkuat strategi pemasaran melalui kemitraan dengan agen perjalanan dan pemanfaatan media sosial.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam pengembangan ekowisata Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar membutuhkan tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sunaryo (2013) bahwa "*pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan berlanjutan dan berwawasan lingkungan, hanya akan dapat terlaksana melalui prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik (good*

tourism governance).” Konsep tersebut merupakan adaptasi konsep *good governance* pada sektor pariwisata yang dilihat dari sinergis antar tiga aktor kunci yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan penerapan sepuluh prinsip yaitu partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitor dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utamy et al. (2023), dengan judul *Good Tourism Governance* dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting Kabupaten Berau, menunjukkan bahwa lima dari sepuluh indikator belum diterapkan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM lokal, komunikasi aktor (pemerintah-swasta) yang tidak efektif, keamanan fasilitas yang belum terjamin, ketiadaan utilitas pengolahan limbah, jaringan telekomunikasi yang buruk, kurangnya pencatatan pelatihan, dan minimnya promosi budaya dan informasi wisata. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa *good tourism governance* juga dapat menjadi kerangka analisis yang komprehensif untuk meneliti tata kelola ekowisata di Kebun Raya Mangrove Surabaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“*Good Tourism Governance* Pada Kebun Raya Mangrove Surabaya Sebagai Upaya Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan *Good Tourism Governance* Pada Kebun Raya Mangrove Surabaya Sebagai Upaya Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Penerapan *Good Tourism Governance* Pada Kebun Raya Mangrove Surabaya Sebagai Upaya Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penulis maupun seluruh pihak yang terlibat. Berikut terdapat manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teori *Good Tourism Governance* dalam ranah pengelolaan ekowisata Kebun Raya Mangrove Surabaya sekaligus dapat menjadi bahan rujukan dalam mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi bagi akademisi yang memiliki lingkup penelitian yang sama terutama bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik.

3. Bagi Pemangku Kepentingan Terkait

Sebagai informasi sekaligus bentuk kontribusi berupa saran atau rekomendasi dari hasil penelitian untuk dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya terkait *Good Tourism Governance* Pada Kebun Raya Mangrove Surabaya Sebagai Upaya Pengembangan Wisata Berkelanjutan bagi Pemerintah Kota Surabaya.